

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (Studi
Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa
Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**

Arizqi Istiadi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Arizqi46@gmail.com

Hj. Weni Rosdiana, S. Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu inovasi program pemerintah dalam memperkuat program KKBPK dengan mempersempit ruang lingkup sasaran yaitu dalam tingkat wilayah atau desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator di dalam teori tersebut yaitu (1) komunikasi yang berisikan transmisi yang dilakukan dengan sosialisasi berupa undnagan sosialisasi di balai desa dan di berikan pembekalan, kejelasan informasi masih belum dipahami betul oleh masyarakat, dan konsistensi program Kampung KB di lakukan dengan berdasarkan Juknis Kampung KB (2) sumber daya yang berisikan sumber daya manusia dengan jumlah yang sudah mencukupi, anggaran yang didapatkan berasal dari BKKBN Provinsi, APBD, serta ADD, sementara fasilitas yang diberikan yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader(3) dan struktur birokrasi yaitu terdapat SOP yang mana menggunakan Juknis Kampung KB sebagai pedoman prosedur pelaksanaan Kampung KB serta fragmentasi yang mana pembagian tugas yang dijalankan oleh Dinas PPKBD, UPT-PPKBD Kecamatan Prambon, PLKB, dan kader sudah sesuai dengan buku petunjuk teknis Kampung KB. Ketiga indikator tersebut sudah dikatakan berjalan sesuai dengan harapan. Berbeda dengan indikator lainnya, untuk indikator disposisi yang terdapat sikap dan juga insentif disini mengalami sebuah hambatan, dimana hambatan tersebut terletak pada disposisi sikap yang diberikan oleh implementor yaitu Kader yang kurang kompeten atau maksimal dalam pelaksanaan program Kampung KB, dan mengakibatkan terhambatnya program tersebut. Dari masalah yang muncul tersebut maka peneliti memberikan saran yaitu (1) meningkatkan metode penyampaian informasi dengan lebih jelas dan mudah dipahami (2) segera menjalankan program PIK dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah (3) Meningkatkan lagi kemampuan personal dari para kader dalam pemahaman, penyampaian dan pelaksanaan materi melalui pelatihan-pelatihan lagi.

Kata Kunci : *implementasi, kebijakan, Kampung KB*

Abstract

Kampung Keluarga Berencana (KB) is one of the innovations of government programs in strengthening KKBPK program by narrowing the scope of the target that is in the region or village level. The result of the research indicates that each indicator in the theory is (1) the communication which contains the transmission which is done by socialization in the form of socialization at the village hall and given the briefing, the clarity of the information is still not well understood by the community, and the consistency of the Kampung KB program is done with Based on Juknis Kampung KB (2) resources that contain human resources with sufficient amounts, the budget obtained comes from BKKBN Province, APBD, and ADD, while the facilities provided are in the form of activities and also additional books built for the cadres (3) and the bureaucratic structure that there are SOP which use Juknis Kampung KB as a guideline for the implementation procedure of Kampung KB and fragmentation where the division of tasks carried out by the Office of PPKBD, UPT-PPKBD Prambon Sub-district, PLKB, and cadres are in accordance with the technical manual of Kampung KB . These three indicators have been said to go in line with expectations. Different from other indicators, for the disposition indicator that there are attitudes and incentives here, there is an obstacle, where the obstacle lies in the disposition of the attitude given by the implementation of the less competent or maximal Cadres in the implementation of the Kampung KB program, and resulted in the program hampering. From the problems that arise, the researcher suggests that (1) improve the delivery method of information more clearly and easily understood (2)

immediately run the PIK program and cooperate with the schools (3) Increase the personal ability of the cadres in understanding, And the implementation of the material through more trainings

Keywords: *implementation, policy, Kampung KB*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana masih banyak terjadi masalah yang cukup kompleks terkait kependudukan. Jumlah penduduk Indonesia masih menempati urutan keempat di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Perkiraan pemerintah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 akan mencapai 252.124.458 jiwa, dan akan terus bertambah pada tahun 2015 hingga mencapai 270 juta jiwa. (bps.go.id) dengan jumlah sedemikian banyaknya tentu bukan persoalan yang mudah dalam mengatasi persoalan penduduk.

Permasalahan kependudukan di Indonesia perlu perhatian yang cukup serius dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun non pemerintah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi salah satu kendala dalam pembangunan di beberapa sektor. Jika tidak ditangani, maka berakibat meningkatnya kemiskinan serta kesehatan masyarakat juga akan menurun, sehingga daya saing dari bangsa semakin rendah. Dari permasalahan penduduk tersebut maka perlu adanya suatu kebijakan program pengendalian penduduk. (World Health Organization)

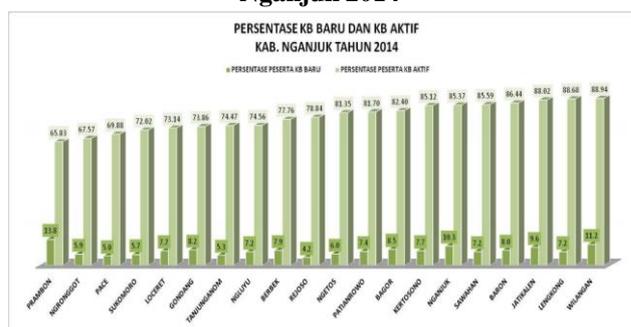
Menurut Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan tentang bagaimana mengatur atau mengendalikan tatanan kependudukan terkait dengan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk agar menjadi suatu tatanan penduduk yang merata dan berbanding dengan perekonomian masyarakat tersebut. hal ini juga bertujuan menjadikan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan tanpa adanya kesenjangan ekonomi.

Meski pemerintah telah mengeluarkan program Keluarga Berencana (KB), namun program tersebut dirasa lambat laun melemah dari berbagai sudut persoalan, mulai dari pencapaian peserta KB yang mengalami penurunan, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut sebagai keperluan kesehatan serta kesejahteraan di masa yang akan datang. Berbagai macam hambatan terjadi pada tingkat daerah, kelurahan, RT/RW, atau bahkan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang minim terkait program tersebut menjadikan timbulnya rasa kurang

tertarik masyarakat untuk ikut serta dalam program KB. Menyikapi hal ini, untuk mempersempit ruang lingkup penanganan program dan mendukung lanjutan dari program tersebut maka BKKBN pun berupaya dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar ikut andil dalam pelaksanaan program ini. Dengan di keluarkannya inovasi strategis munculah program lain yang akan secara utuh terjun langsung di lini lapangan, program tersebut yaitu program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Salah satu daerah yang menjalankan kebijakan Program Kampung KB ini yaitu terletak di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh PPKBD Nganjuk pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa tidak semua daerah di Kabupaten Nganjuk menunjukkan angka peserta KB yang sesuai dengan harapan keberhasilan. Hampir seluruh daerah masih sangat minim pesertanya, dengan kata lain masyarakat belum sepenuhnya paham dan sadar diri akan program KB ini. Berikut adalah bagan presentase KB Baru dan KB Aktif Kabupaten Nganjuk Tahun 2014:

Bagan 1.1
Presentase peserta KB aktif dan KB baru Kabupaten Nganjuk 2014



Sumber: BKKBN Nganjuk

Berdasarkan grafik diatas, Kecamatan Prambon pada tahun 2014 memiliki persentase terendah dalam jumlah peserta aktif KB se-Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut memperkuat alasan mengapa Kecamatan Prambon mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dan dilibatkan dalam program Kampung KB tersebut.

Program Kampung KB ini dikelola serta dilaksanakan oleh petugas dari Dinas PPKBD yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait pada tingkat wilayah. Dengan antusiasme masyarakat serta dukungan dari perangkat desa, program kampung KB berjalan sesuai dengan prosedur sebagai bentuk upaya agar program ini tercapai sesuai dengan harapan. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensejahterakan daerah dengan menciptakan sebuah wadah bagi mereka berupa keluarga kecil yang bahagia serta sejahtera. Untuk mendukung berjalannya program Kampung KB ini juga memerlukan sumber dana, dana yang di dapat dan dialokasikan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Alokasi Dana Desa (ADD).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, peneliti mengarah pada salah satu kelompok sasaran yaitu keluarga dengan remaja. Dalam program Kampung KB keluarga dengan remaja ini di libatkan dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR). Peran keluarga dengan remaja diharapkan mampu mempengaruhi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan fenomena pernikahan di bawah usia nikah khususnya bagi kalangan wanita. Remaja dan permasalahannya menjadi isu penting saat ini. Jumlah yang besar, yaitu sekitar 64 juta atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia (Sensus Penduduk, 2010) mengakibatkan remaja memerlukan perhatian besar dalam pembinaannya. Disamping itu remaja sangat rentan terhadap resiko Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yaitu tiga resiko yang dihadapi oleh remaja yang diantaranya adalah seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS. (Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja)

METODE

Dalam penelitian tentang “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)” merupakan penelitian jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana akan memberikan suatu gambaran penjelasan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Sedangkan menurut Moleong (2004:06) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sugiyono (2008) juga mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dari data empiris yang diperoleh, dan dalam pendekatan inipun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian tentang Kampung Keluarga Berencana ini membutuhkan data-data yang tidak bisa diperoleh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Misalnya, mengenai bagaimana langkah untuk mencapai tujuan program Kampung KB dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan program Kampung KB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan untuk mengkoordinasi seluruh pihak terkait perkait kebijakan yang akan di terapkan mulai dari jabatan paling atas hingga paling bawah. Apabila tujuan serta sasaran dari suatu kebijakan tersebut tidak ada kejelasan maka kemungkinan akan adanya kesalahan dalam berbagai hal sehingga implementasi kebijakan tersebut pun tidak akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menganalisa terkait dengan komunikasi yang telah di sampaikan terkait dengan program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada sasaran keluarga dengan remaja khususnya oleh pihak Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan dan berupaya sebaik mungkin dalam penyampaian informasi dari program tersebut kepada PKB/PLKB, Kader, TOGA, TOMA, dan juga SKPD terkait. Penyampaian informasi tersebut berupa sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar para pihak yang terkait atau implementor program Kampung KB dapat secara cermat mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan, manfaat, prosedur pelaksanaan, dan juga sasaran dari program tersebut. Sosialisasi dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu diantaranya pembuatan gapura dan juga memanfaatkan media cetak yaitu banner, baliho, dll. Sosialisasi berbentuk lain yaitu penyuluhan secara langsung terkait

program Kampung KB. Begitu pula pernyataan yang telah diberikan oleh masyarakat yang mana menyatakan bahwa mereka mendapatkan undangan sosialisasi di Balai Desa Sonoageng di mana sosialisasi tersebut menjelaskan akan diadakannya program Kampung KB. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi atau transmisi dalam pelaksanaan program Kampung KB telah berjalan dengan cukup baik, mengingat bahwa koordinasi antara implementor dan juga sasaran kegiatan sudah mendapatkan informasi tentang Kampung KB.

Sementara untuk kejelasan dari informasi terkait pelaksanaan Kampung KB yang telah disampaikan oleh pihak PPKBD Kabupaten Nganjuk sudah baik dan jelas. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya pernyataan dari Kepala Bidang KB di Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk. Kejelasan informasi yang didapat dari Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk tersebut kemudian pihak PLKB pun dapat melaksanakan Program Kampung KB itu sesuai dengan prosedur dan juga berpedoman pada buku petunjuk teknis Kampung KB. Beralih dari hak tersebut bahwa dari jajaran advokasi sudah menyampaikan informasi dengan jelas, tetapi masalah yang justru muncul yaitu pemahan yang ditangkap oleh masyarakat terkait Kampung KB sebagian besar masihlah kurang. Terbukti bahwa peserta yang ikut serta mengikuti kegiatan tersebut masihlah minim, meski peserta bertambah, itu pun hanya beberapa saja dan tidak secara langsung dengan jumlah yang tinggi.

Terkait dengan konsistensi dari program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini sudah baik, karena pedoman yang digunakan dari awal kegiatan yang dimulai dari sosialisasi, pelaksanaan, laporan, sampai evaluasi tidak pernah berubah yaitu menggunakan apa yang ada pada buku petunjuk teknis. Sementara untuk landasan hukumnya dari awal pencaangan Kampung KB sampai sekarang, tetap berlandaskan pada SK Kecamatan, dalam SK tersebut sudah tertuang dengan adanya surat edaran dari Bupati Nomor: 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencaangan dan Pembentukan Kampung KB.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki tiga sub indikator dalamnya yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Kampung KB, diantaranya yaitu: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan juga sumber daya fasilitas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan dari suatu program. Dalam kegiatan kampung KB di Dusun Waung ini untuk sumber daya manusianya tidak memiliki kekurangan, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Deki selaku ketua UPT-PPKBD dan juga PLKB dari Kecamatan Prambon. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Dianing bahwa para pelaksana Kampung KB di Dusun Waung tidak merasa kekurangan dari sisi sumber daya manusianya, karena dengan adanya 20 kader yang ikut serta dan juga dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat serta dari perangkat desa sudah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang melibatkan persoalan tentang dana atau modal awal yang memang sudah direncanakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan di alokasikan dalam suatu kegiatan. Hasil dari penelitian terkait anggaran yang dipergunakan sudah mampu mencukupi untuk menutupi kebutuhan dana yang ada selama proses program Kampung KB berjalan. Untuk anggaran itu sendiri berasal dari APBD, ADD, dan juga dari BKKBN Provinsi. Untuk pencaangan yaitu berupa pembangunan gapura dan keperluan sosialisasi pada awalnya dibiayai oleh BKKBN Provinsi, kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu dalam kebutuhan konsumsi, penyuluhan, serta uang transport bagi para kader berasal dari anggaran APBD dan juga dibantu dengan ADD.

Sumber daya fasilitas disini memiliki peran penting dalam mendukung serta menunjang berjalannya Program Kampung KB. Fasilitas disini berupa sarana dan prasarana yang memang layak diadakan untuk menunjang keberhasilan program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Ibu Deki Artini bahwasannya fasilitas atau sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan Kampung KB ini adalah salah satunya yaitu tempat. Tempat yang dipergunakan selama kegiatan kampung KB berlangsung yaitu bertempat pada rumah-rumah atau kediaman salah seorang warga yang bersedia, terkadang juga saat ada penyuluhan maka tempat yang digunakan yaitu berada di Balai Desa Sonoageng. Tidak hanya tempat saja, sarana dan prasarana lain juga diberikan seperti buku penyuluhan yang diperuntukkan kepada ibu-ibu kader untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Selain tempat dan buku penyuluhan tersebut, fasilitas lain juga diberikan pada balita yang ikut dalam kegiatan kampung KB tersebut, fasilitas tersebut yaitu Alat Permainan Edukatif (APE) yang mana berguna untuk mengasah

kemampuan bagi para balita dalam konteks edukasi mereka.

3. Disposisi

Disposisi sendiri terbentuk dari dua sub indikator yaitu sub indikator sikap dan juga sub indikator insentif yang di berikan. Sub indikator sikap yang bersifat positif maka akan terjadinya kegiatan yang memiliki koordinasi serta kesinambungan antara para implementor dengan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa sikap yang diberikan oleh para implementor yaitu PLKB dan juga Kader didalam kegiatan program kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini dipaparkan oleh Ibu Deki Artini selaku Ketua PLKB dan UPT-PPKBD Kecamatan prambon, beliau mengatakan bahwa dari pihak implementor sendiri menerima sangat baik dengan adanya program Kampung KB ini, menurut beliau dengan adanya kampung KB ini nantinya akan mensejahterakan masyarakat Dusun Waung tersebut, dan jika program ini berhasil maka hal tersebut juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Program Kampung KB ini. Namun ada beberapa kendala terkait sikap yang diberikan oleh para kader, yaitu kurangnya pendekatan secara personal pada peserta kampung KB dengan para kader. Terkait akan hal tersebut juga menjadikan kurangnya pula pengawasan orang tua kepada anaknya. Hal tersebut memicu minimnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya program tersebut sehingga masih adanya masalah. Pernikahan dibawah usia nikah yang terjadi di dusun Waung ini masih dikatakan melebihi batas yang ditentukan oleh BKKBN. batas yang ditentukan BBKN yaitu tidak lebih 20% dari jumlah pernikahan yang ada selama 1 tahun. Tetapi yang terjadi di Dusun Waung sendiri angkat presentase tersebut bahkan melebihi 20%. Berbagai macam faktor telah terjadi di masyarakat, maka dari itu pihak terkait Kampung KB disini masih saja terus mengupayakan agar kendala tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin.

Sub indikator selanjutnya yaitu adalah insentif yang telah diterima dan diberikan. Diperlukan adanya insentif yang cukup layak diberikan kepada pelaksana kegiatan. Insentif sendiri merupakan bentuk menghargai dengan apa yang telah dilakukan. Insentif di dalam kegiatan Program Kampung KB di Duwun Waung Desa Sonoageng kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sendiri sudah cukup baik. Insentif yang diterima oleh PLKB berasal dari gaji perbulan mereka, untuk masalah jumlah besar kecilnya insentif tersebut diukur dari golongan serta pangkat atau pun peran yang dijalankan.

Untuk para kader sendiri telah disediakannya uang transportasi yang bersal dari ADD Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa disposisi yang diberikan belum tercapai secara maksial, hal tersebut dikarenakan dari kurangnya kesadaran sikap dari para kader yang acuh terhadap tugas yang diberikan yang mana pendekatan atau kunjungan ke rumah warga kelompok BKR ini dirasa kurang sehingga masyarakat dari kelompok BKR ini pun belum menjalankan secara utuh terkait materi yang diberikan saat kegiatan BKR berlangsung. Hal tersebut mengakibatkan masih adanya masyarakat yang mengabaikan pula program Kampung KB tersebut, dan juga menimbulkan kendala yang masih terjadi yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah usia pernikahan. Hal tersebut bisa terjadi karena macam-macam faktor terutama peran orang tua yang menjadi pengawas dan pembimbing bagi anaknya.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua sub indikator dalam struktur birokrasi, yang pertama yaitu Standart Opreasional Prosedur (SOP). SOP sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu program. SOP digunakan sebagai acuan langkah-langkah atau tahapan dari tindakan yang akan diambil selama proses pelaksanaan dari suatu kegiatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, SOP dari Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik, SOP yang digunakan yaitu berupa buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB, mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan dan juga evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut.

Sub indikator fragmentasi merupakan pembagian tugas, kewajiban, serta wewenang yang terkait dengan suatu program. Dalam hal ini, fragmentasi dalam pelaksanaan program Kampung KB di Dusun Waung sudah dikatan baik. Segala tugas-tugas dan wewenang yang telah diberikan juga dijalankan dengan sesuai prosedur yang ada. Pelaksanaan dari pihak Dinas PPKBD Nganjuk, PLKB Kecamatan Prambon, serta para Kader Kampung KB sudah melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai dengan buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB. Menurut hasil penelitian yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Deki Artini selaku Ketua UPT-PPKBD Kecamatan Prambon bahwa mereka tidak hanya melaksanakan kegiatan begitu saja, bentuk pertanggungjawaban yang di berikan yaitu berupa laporan hasil dari kegiatan Kampung KB yang diberikan

setiap tiga bulan sekali, dan juga ada tahap evaluasi yang mana dilaksanakan pada akhir tahun.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terkait dengan struktur birokrasinya, Program Kampung KB ini tidak mengalami masalah, dan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari standart pelaksanaan yang dijalankan sudah jelas dan sesuai dengan apa yang terdapat pada pedoman yang di pegang yaitu buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB. Sementara fragmentasi atau pembagian tugas serta wewenangnya juga baik, karena para implementor pun menjalankan tugas mereka sesuai peran masing-masing sebaik mungkin.

Merujuk pada seluruh indikator diatas bahwa semua jajaran baik pelaksana dan juga sasaran kegiatan terkait informasi yang di berikan sudah sampai dan cukup jelas. Sumberdaya yang ada pada kegiatan kampung KB tersebut juga sudah memadai, sementara untuk Disposisi yang diberikan sangat direspon dengan sangat baik, walaupun dari elemen masyarakatnya sendiri yang kurang mau menanggapi atau kurangnya kesadaran mereka. Dan yang terakhir dilihat dari struktur organisasi, program Kampung KB ini sudah dijalankan sesuai dengan pedoman dari buku petunjuk teknis Kampung KB, serta tugas yang di berikan pun sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada kemudian di pertanggungjawabkan dengan berupa laporan pada setiap tiga bulan sekali.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk telah dideskripsikan dengan menggunakan teori model Implementasi yang di kemukakan oleh George Edward III yang mana terdapat empat indikator didalamnya, yaitu antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut adalah penjabaran dari Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kegiatan Bina Keluarga Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).

Dalam indikator komunikasi, diketahui bahwa penyampaian informasi yang diberikan terkait Program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini sudah cukup baik. Penyampaian informasi yang diberikan oleh Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk dengan mengundang secara langsung para PLKB, Kader, Tokoh Masyarakat, serta perangkat Desa Sonoageng. Namun Informasi yang diberikan juga belum begitu sesuai dengan harapan, karena sasaran kegiatan masih banyak sebagian besar

yang kurang tertarik dan juga tidak paham betul terkait program Kampung KB ini. Sedangkan untuk sub indikator konsisten sendiri, Program Kampung KB yang dijalankan berjalan dengan berlandaskan SK Kecamatan dan pedoman yang dipakai selama kegiatan juga sesuai dengan petunjuk teknis Kampung KB sampai sekarang dan juga dibantu dengan materi-materi lain terkait pada setiap kegiatan.

Sedangkan jika dilihat dari indikator Sumber dayanya, implementasi Program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sudah memadai. Dengan sumber daya manusia yang ada memang sudah mencukupi dalam pelaksanaannya dan bagian tugas masing-masing. Dari sub indikator anggaran juga fasilitas sudah tidak mengalami kekurangan, namun harapan kedepannya bagi untuk lebih menunjang kebutuhan dan mendukung keberhasilan dari Program Kampung KB ini ada lagi bantuan khusus atau dana khususnya.

Indikator Disposisi disini memiliki dua sub indikator, dari segi sub indikator sikap yang diberikan oleh implementor kebijakan kampung KB sangat direspon dengan baik, mereka sangat menerima dan bahkan akan bangga jika program ini berhasil. Namun hal yang cukup bertolak dari disposisi sikap yang ditunjukkan oleh para kader, para kader disini belum sepenuhnya mampu dalam pelaksanaan program Kampung KB terutama pada kegiatan BKR yaitu dalam konteks penyuluhan secara personal atau kunjungan ke rumah masyarakat yang menyebabkan program ini berjalan kurang baik, hal tersebut menyebabkan hubungan antara implementor dengan masyarakat kurang terjalin dengan selaras, yang kemudian bertimbal pada masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya program tersebut, sehingga masih ada timbulnya permasalahan yang memang menjadi target dari kampung KB ini. Permasalahan tersebut yaitu pernikahan di usia dini, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya binaan dan pengawasan dari orang tua, faktor ekonomi, dan faktor kemauan mereka sendiri. Berpaling dari sub indikator sikap, terdapat sub indikator insentif, untuk insentif yang diterima disini tidak ada kecuali uang gaji tetap untuk para PLKB, sementara untuk para Kader hanya mendapat uang transport per bulannya kurang lebih Rp 50.000 rupiah.

Indikator Struktur Birokrasinya dalam pelaksanaan program Kampung KB di Dusun Waung ini sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti melalui sub indikator SOP nya, SOP yang digunakan sudah sangat jelas menggunakan petunjuk teknis Kampung. Sub

indikator fragmentasi sudah dilaksanakan dengan baik pula, hal tersebut terbukti bahwa tiap implementor atau pihak terkait lintas sektor lainnya sudah menjalankan tugasnya masing-masing dengan tanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa dengan laporan yang diberikan pada setiap tiga bulan sekali, sementara untuk evaluasi yaitu dilakukan pada akhir tahun yaitu bulan september.

Berdasarkan semua hasil dari penelitian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk khususnya pada kegiatan Bina Keluarga Remaja, hanya saja masih terdapat masalah pada indikator disposisi yaitu sikap yang mana diberikan oleh para kader Kampung KB yang dinilai kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bila dibiarkan terus menerus maka nantinya bisa menjadi penghambat keberhasilan Program Kampung KB.

Saran

Setelah dilakukannya penelitian terkait implementasi program Kampung KB ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diantaranya yaitu segera mungkin menjalankan program Pusat Informasi dan Konseling (PIK) untuk menangani permasalahan yang masih menjadi fenomena di Dusun Waung yaitu pernikahan pada usia dini yang masih cukup tinggi, hal tersebut sebaiknya lebih diperhatikan lagi dari kelompok sasaran keluarga dengan remaja melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR). Meningkatkan kerja sama dengan dinas pendidikan dengan pelaksanaannya di sekolah-sekolah yang nantinya di tujukan pada siswa siswi dengan memberikan pembinaan terutama terkait masalah yang nantinya juga untuk mencegah adanya seks bebas, mencegah penggunaan Narkotika Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) serta menurunkan angka pernikahan usia dini. Meningkatkan kemampuannya dalam pemahaman, penyampaian dan pelaksanaan materi melalui pelatihan-pelatihan tertentu yang dibantu oleh PLKB dan Kader yang lebih senior atau lebih mampu dalam mendampingi masyarakat, agar nantinya relasi antara masyarakat atau keluarga dari balita, lansia dan juga remaja bisa terbangun dengan lebih baik lagi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. sebagai dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih juga untuk Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Bapak Muhamad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. sebagai dosen penguji penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afifiddin dan Saebani, Bani Ahmad. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; CV Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan, 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Narbuko, Sholid, dkk. Metodologi Penelitian. Jakarta; PT. Bumi Aksara
- Nugroho D, Riant, 2005. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT. Refika Aditama
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2006. Analisis Kebijakan: dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Referensi jurnal:

- Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Anindya Wayan Pramithasari (Jurnal Online)
- Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan

Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing Tahun 2006. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang 2006, Akhmad Zaeni NIM. D4E005019 (Jurnal Online)

Pearaturan dan Undang-undang:

Surat Putusan Camat Prambon

Petunjuk Teknis Program Kampung KB Tahun 2015

Pedoman Bina Keluarga Remaja

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota pada huruf N

Online:

<http://stialan.ac.id/artikel%20hamka.pdf>

<http://bps.go.id>